

YANG BUTUH MENUNGGU, YANG TERDAFTAR TERSENYUM: CERMIN BURAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA

Rabu, 15 April 2026 - Lampung

Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, program bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi jaring pengaman utama bagi masyarakat yang paling rentan. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: mereka yang benar-benar membutuhkan sering kali harus menunggu, sementara yang telah terdaftar justru tersenyum menikmati bantuan, meski tidak selalu layak menerimanya.

Fenomena ini bukan sekadar anomali kecil, melainkan gambaran persoalan struktural dalam tata kelola kebijakan sosial di Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa sekitar 45% penyaluran bansos tidak tepat sasaran, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp14-Rp17 triliun. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi representasi dari kegagalan sistem dalam menjangkau mereka yang seharusnya dibantu.

Masalah utama tampaknya terletak pada fondasi kebijakan itu sendiri: data. Basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan penentuan penerima bantuan masih jauh dari kata akurat. Ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dan data administratif menjadi akar dari berbagai persoalan lanjutan. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan keluarga mampu yang tetap menerima bantuan, sementara keluarga miskin justru tidak terdaftar.

Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya proses verifikasi dan pemutakhiran data. Pendataan yang tidak dilakukan secara berkala menyebabkan informasi menjadi usang dan tidak relevan. Padahal, dinamika sosial ekonomi masyarakat sangat cepat berubah-seseorang yang hari ini mampu bisa saja jatuh miskin esok hari, dan sebaliknya. Tanpa sistem pembaruan data yang responsif, kebijakan bansos akan terus berjalan di atas asumsi yang keliru.

Kasus di daerah, seperti yang terjadi di Lampung Utara, memperjelas kompleksitas persoalan ini. Perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari sembako menjadi bantuan tunai memicu kebingungan di masyarakat. Sebagian warga menganggap terjadi penyimpangan karena menerima bantuan dalam bentuk yang berbeda dari yang mereka pahami sebelumnya. Padahal, perubahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan baru yang belum tersosialisasikan dengan baik.

Di sinilah persoalan komunikasi kebijakan menjadi krusial. Kebijakan yang baik sekalipun dapat menimbulkan masalah jika tidak dikomunikasikan secara efektif. Masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga pemahaman yang jelas mengenai hak dan mekanisme yang berlaku. Kurangnya sosialisasi membuka ruang bagi kesalahpahaman, bahkan kecurigaan terhadap pemerintah.

Lebih jauh lagi, ketidaktepatan penyaluran bansos bukan hanya berdampak pada pemborosan anggaran negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat ketidakadilan dalam distribusi bantuan, muncul persepsi bahwa pemerintah tidak mampu mengelola program secara transparan dan akuntabel. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan legitimasi kebijakan publik itu sendiri.

Padahal, bansos bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen keadilan sosial. Tujuannya bukan hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak. Ketika penyalurannya tidak tepat sasaran, maka esensi keadilan tersebut menjadi hilang.

Oleh karena itu, perbaikan sistem bansos tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan reformasi menyeluruh, dimulai

dari integrasi dan validasi data yang lebih akurat, pemanfaatan teknologi digital untuk pemutakhiran data secara real-time, hingga penguatan kapasitas aparatur di tingkat daerah. Selain itu, transparansi harus menjadi prinsip utama, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga perlu didorong. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengawal keadilan distribusi.

Pada akhirnya, persoalan bansos adalah persoalan keberpihakan. Apakah negara benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan, atau justru terjebak dalam sistem yang tidak sensitif terhadap realitas sosial? Selama masih ada masyarakat miskin yang terabaikan, sementara yang tidak berhak justru menikmati bantuan, maka bansos belum sepenuhnya menjalankan fungsinya.

Fenomena "yang butuh menunggu, yang terdaftar tersenyum" seharusnya menjadi refleksi bersama. Ini bukan hanya kritik terhadap pemerintah, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki sistem secara kolektif. Sebab, keadilan sosial bukan sekadar tujuan, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan secara nyata.

Natasya Aulia

Mahasiswa Magang

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung